

Nadiya Alifa Firdaus
2413031066

1. Pengaruh Teknologi Blockchain terhadap Teori Akuntansi (Reliabilitas & Transparansi) dalam Sustainability Reporting

Penggunaan blockchain dalam sustainability reporting dapat memperkuat dua karakteristik kualitatif utama dalam teori akuntansi, yaitu reliabilitas dan transparansi.

a. Reliabilitas Informasi

Blockchain memiliki sifat immutable (tidak dapat diubah) dan traceable.

Implikasinya dalam akuntansi:

Setiap data terkait jejak karbon, penggunaan energi, atau asal bahan baku yang diinput ke dalam blockchain akan terekam secara permanen.

Hal ini mengurangi kemungkinan manipulasi data karena perubahan informasi memerlukan konsensus seluruh node.

Konsep reliabilitas dalam kerangka konseptual akuntansi diperkuat karena data lebih dapat diverifikasi dan memiliki bukti audit yang jelas.

Namun, teori akuntansi juga menekankan keandalan input, bukan hanya keandalan penyimpanan. Blockchain tidak bisa mendeteksi apakah data awal sudah benar. Artinya, jika terjadi kesalahan input atau rekayasa sejak awal, blockchain justru mengabadikannya, sehingga risiko garbage in – garbage forever harus dipertimbangkan.

b. Transparansi

Transparansi meningkat karena data dapat diakses lebih luas oleh stakeholder seperti auditor, investor ESG, dan regulator.

Ini mendukung prinsip GRI yang mendorong keterbukaan atas dampak lingkungan dan sosial perusahaan.

Blockchain juga berpotensi mendukung prinsip accountability dalam teori stakeholder, karena perusahaan tidak bisa menutupi perubahan data atau menyesuaikan angka jejak karbon seenaknya.

Kesimpulan:

Teknologi blockchain dapat memperkuat transparansi dan reliabilitas dalam sustainability reporting, tetapi hal ini hanya efektif jika mekanisme input data dan tata kelola teknologi diawasi dengan ketat.

2. Tantangan yang Mungkin Dihadapi PT Hijau Lestari dalam Konteks Regulasi Indonesia dan Global

a. Ketiadaan regulasi teknis terkait blockchain dalam pelaporan keberlanjutan

Saat ini, Indonesia belum memiliki panduan spesifik mengenai penggunaan blockchain untuk pelaporan ESG atau sustainability reporting. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi perusahaan.

b. Ketidaksesuaian dengan kerangka PSAK dan standar audit

PSAK dan standar audit Indonesia belum memberikan pedoman jelas tentang:

bagaimana memverifikasi bukti berbasis blockchain,

bagaimana auditor memastikan validitas data on-chain,

bagaimana perubahan smart contract dicatat dalam laporan keuangan atau non-keuangan.

c. Tantangan kompatibilitas dengan GRI dan standar global ESG

Walaupun GRI mendukung prinsip transparansi, GRI belum mengatur penggunaan teknologi blockchain secara teknis. Perusahaan harus memastikan bahwa blockchain tidak membuat pelaporan menjadi terlalu teknis dan sulit dibaca oleh publik.

d. Risiko etika dan privasi data

Data pemasok, lokasi kebun, dan rantai pasok dapat bersifat sensitif. Blockchain publik menimbulkan risiko kebocoran data, sementara blockchain privat menimbulkan pertanyaan tentang independensi dan verifikasi.

e. Kesiapan SDM dan biaya implementasi

Implementasi blockchain membutuhkan:

investasi teknologi,

pelatihan staf, dan

kesiapan auditor.

Agribisnis skala besar mungkin mampu, tetapi prosesnya tetap kompleks.

f. Penerimaan stakeholder dan regulator

Tidak semua stakeholder memahami blockchain. Regulator juga mungkin memerlukan waktu tambahan untuk menilai model pelaporan yang baru ini.

3. Rekomendasi Strategis untuk Mendukung Keberhasilan Implementasi

a. Membangun Tata Kelola Data dan Teknologi yang Kuat

Perusahaan harus mengembangkan:

standar input data,

mekanisme verifikasi internal,

prosedur kontrol kualitas data,

pengawasan terhadap sensor IoT atau sistem pengumpulan jejak karbon.

Blockchain hanya efektif jika data awal akurat.

b. Menggunakan Blockchain Konsorsium (Permissioned Blockchain)

Model ini memberikan:

keamanan tinggi,

kontrol akses,

kemudahan audit,

perlindungan data sensitif.

Ini lebih cocok untuk agribisnis dibanding blockchain publik.

c. Menyelaraskan dengan GRI, IFRS Sustainability, dan ISSB

PT Hijau Lestari perlu memastikan bahwa:

indikator GRI tetap digunakan,

data blockchain hanya menjadi supporting evidence,

pelaporan tidak menjadi terlalu teknis.

d. Melakukan Pelatihan bagi Manajemen, Auditor, dan Tim Sustainability

Agar AI/IoT/blockchain benar-benar dipahami sebagai alat, bukan sekadar label teknologi.

e. Konsultasi dengan Regulator dan Auditor Sejak Awal

Untuk mengurangi risiko penolakan atau ketidaksesuaian standar:

Libatkan OJK, Kemenkeu, dan auditor publik dalam desain sistem pelaporan sejak awal.

f. Menyiapkan Narasi Pelaporan yang Jelas

Blockchain memberikan bukti data, tetapi narasi tetap perlu menjelaskan:

dampak lingkungan,

strategi perusahaan,

komitmen keberlanjutan,

risiko dan batasan teknologi.

g. Menggunakan Model Pilot Project

Mulai dari satu area pelaporan terlebih dahulu, misalnya:

jejak karbon, atau

sumber bahan baku bersertifikat.

Setelah berhasil, baru diperluas.